



Format 1

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon :
Faksimile :

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan
Terhadap Sdr.

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
.....(alamat).....
.....

Sehubungan dengan Pengurusan Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap Sdr. selaku debitor piutang negara/pengurus(nama Penanggung Hutang)..... *), yang berdasarkan hasil penelitian dianggap mampu namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Objek Paksa Badan

- Nama Lengkap :
- Jenis Kelamin :
- Alamat lengkap :
- Pekerjaan/Usaha :
- Tempat/Tanggal Lahir :

2. Pengurusan Piutang Negara

- Penyerah Piutang :
- Penanggung Hutang :
- Surat penyerahan pengurusan : Nomor tanggal
- Nilai Penyerahan : Rp.....
- Sisa Piutang Negara : Rp.....
- Surat Paksa : Nomor tanggal
- Tingkat Pengurusan Terakhir :
- Perkiraan Nilai Barang jaminan : Rp.....



3. Rencana Paksa Badan:

- a. Surat Persetujuan Ketua PUPN Pusat : Nomor tanggal
- b. Jangka waktu pelaksanaan : paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu *).

Ketua,

.....
NIP

Tembusan:

1. Jaksa Agung
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Ketua PUPN Pusat;
3. Kepala Kanwil DJKN;
4. Kepala KPKNL

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 2

KEJAKSAAN TINGGI.....

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Izin Paksa Badan
a.n.

Yth. Ketua PUPN Cabang
.....(alamat).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Tinggi memberikan izin kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang untuk melaksanakan Paksa Badan terhadap:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :
2. Tindakan hukum Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilakukan dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., dengan rincian sebagai berikut:
Penyerah Piutang :
Jumlah Sisa Hutang :
Tanggal/Nomor Surat Paksa:
3. Paksa Badan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
4. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Paksa Badan ditanggung sepenuhnya oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang
5. Izin ini diberikan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor:/PMK.06/2009, KEP. -...../A/JA/...../2009,/...../...../2009, dan M..... tanggal Januari 2009.

Demikian untuk menjadi maklum.

KAJATI

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Yth. Ketua PUPN Pusat
3. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Yth. Asisten Pengawasan
5. Yth. Kanwil DJKN
6. Yth. Kepala Rutan/LAPAS
7.



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 3

KEJAKSAAN TINGGI.....

Jalan
...(nama kota dan kode pos)...
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Penolakan Izin Paksa Badan
a.n.

Yth. Ketua PUPN Cabang
.....(alamat).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal Permintaan Izin Pelaksanaan Paksa Badan Terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., setelah dilakukan penelitian, dengan ini disampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi belum dapat menerbitkan izin Paksa Badan sebagaimana permintaan Saudara, mengingat:

1.
2.
- 3.dst.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala,

.....

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Yth. Ketua PUPN Pusat;
3. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Yth. Asisten Pengawasan;
5. Yth. Kanwil DJKN;
6. Yth. Kepala Rutan/LAPAS;
7. Peringgal.



Format 4

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)...
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : SR -(tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Penolakan Izin Paksa Badan
Terhadap Sdr.

Yth. Ketua PUPN Pusat
Gedung Syafrudin Prawiranegara
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan rencana kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor tanggal, PUPN Pusat telah memberikan persetujuan kepada kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....
2. Melalui surat Nomor tanggal, kami telah mengajukan permintaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memberikan izin kepada kami guna melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....
3. Melalui surat Nomor tanggal, Kepala Kejaksaan Tinggi telah menolak memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst.

Berdasarkan uraian kami di atas, dan mengingat pertimbangan kami bahwa pelaksanaan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... dapat mempercepat dan mengoptimalkan hasil pengurusan Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang.....), kami mohon bantuan Bapak untuk kiranya dapat mengkoordinasikan permasalahan penolakan pemberian izin Paksa Badan tersebut dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung untuk diupayakan penyelesaiannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

.....
NIP

Tembusan:

1. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Kepala Kanwil DJKN
4. Kepala KPKNL

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXXX



Format 5

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon :
Faksimile :

Nomor : SR-.....(tgl/bln/thn).....
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Izin Paksa Badan
a.n.

Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi
.....
.....
di

Sehubungan dengan surat Ketua PUPN Pusat Nomor tanggal, setelah mempelajari permasalahannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Kepala Kejaksaan Tinggi menolak memberi izin kepada PUPN Cabang untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., sebagaimana tertuang dalam surat Nomor tanggal, kurang cukup beralasan, mengingat:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara dapat memberikan Izin kepada PUPN Cabang untuk melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., sebagaimana yang diminta Ketua PUPN Cabang melalui surat Nomor Tanggal.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Jaksa Agung Muda
Perdata Dan Tata Usaha Negara

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung (1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Ketua PUPN Pusat;
4. Yth. Ketua PUPN Cabang;
5. Peringgal.



Format 6A

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

**SURAT PERINTAH PAKSA BADAN
Nomor SPPB-**

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

- Menimbang** : a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang)..... / Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*) kepada Negara c.q.(nama Penyerah Piutang).....;
- b. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor tanggal yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor tanggal
- c. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... tergolong mampu, namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya;
- d. bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., perlu melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua PUPN Pusat Nomor tanggal hal(Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan).....;
2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor tanggal hal(Izin Pelaksanaan Paksa Badan).....;



MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap:

Nama :

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

dengan memasukkan yang bersangkutan ke.....(*rumah paksa badan*)..... selama (*.....*) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan.

Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat;
2. Ketua PUPN Cabang;
3. Kepala Kanwil DJKN;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor;
6.(*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*).....;
7.(*nama Penyerah Piutang*).....;
8.(*nama Objek Paksa Badan*).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n. Ketua
Anggota PUPN Cabang,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 6B

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

**SURAT PERINTAH PAKSA BADAN
Nomor SPPB-**

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

- Menimbang** : a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang)..... / Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*) kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang).....;
- b. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor tanggal yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor tanggal
- c. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... tergolong mampu, namun tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan hutangnya;
- d. bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., perlu melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua PUPN Pusat Nomor tanggal hal(Persetujuan Pelaksanaan Paksa Badan).....;
2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor tanggal hal(Izin Pelaksanaan Paksa Badan).....;



MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap:

Nama :

Alamat :
.....

Pekerjaan :

dengan memasukkan yang bersangkutan ke.....(*rumah paksa badan*)..... selama (*.....*) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dimasukkan ke Tempat Paksa Badan.

Salinan Surat Perintah Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat;
2. Ketua PUPN Cabang;
3. Kepala Kanwil DJKN;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor;
6.(*pimpinan/pénanggung jawab Tempat Paksa Badan*).....;
7.(*nama Penyerah Piutang*).....;
8.(*nama Objek Paksa Badan*).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n. Ketua
Anggota PUPN Cabang,

.....
NIP

Nomor Register BKP : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 7



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN
SURAT PERINTAH PAKSA BADAN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat
di..... saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jusrita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Nomor tanggal dan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:

1. Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Dst. :

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada(nama Objek Paksa Badan)..... bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai, Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal
..... dan saya selaku Jusrita Piutang Negara berdasarkan kekuatan Surat Perintah
Paksa Badan tersebut memerintahkan kepada(nama Objek Paksa Badan)....., supaya
dalam waktu 14 (empat belas) hari melunasi hutang(nama Penanggung Hutang)..... kepada
Negara dengan menyetorkan pembayaran melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL
..... . Jika hutang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka
terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... akan segera dilakukan Paksa Badan.

Saya selaku Jusrita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah Paksa
Badan Nomor tanggal dan Berita Acara Pemberitahuan Perintah Paksa
Badan ini kepada(nama dan alamat penerima Surat Perintah Paksa Badan. Dalam hal
penerima Surat Perintah Paksa Badan bukan Objek Paksa Badan, ditambah kata-kata "untuk
disampaikan kepada orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Paksa Badan)

.....(tgl/bln/thn).....

Penerima Salinan Surat
Perintah Paksa Badan,

Jusrita,

SAKSI-SAKSI:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 8



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

LAPORAN PEMBERITAHUAN
SURAT PERINTAH PAKSA BADAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

dengan ini melaporkan bahwa Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal telah
saya beritahukan dan diterima oleh
dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan sebagaimana terlampir.

Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....(tgl/bln/thn).....

Jurusita,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 9



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal, dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Paksa Badan tersebut telah diberitahukan kepada sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal (copy terlampir) dan Laporan Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal yang dibuat oleh Jurusita Piutang Negara (copy terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN;
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
3. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 10A

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : (tgl/bln/thn).....
Sifat :
Hal : Penangguhan Pelaksanaan Paksa Badan
terhadap Sdr.....

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kejaksaan Tinggi
Di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal,
dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal, yaitu sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal tersebut di atas diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal,(nama Penanggung Hutang)..... telah membayar hutangnya kepada negara sebesar Rp..... (di atas 50% dari sisa hutang).
2. Selain melakukan pembayaran,(nama Penanggung Hutang)..... juga telah membuat surat pernyataan sanggup melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama ... (.....) bulan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menangguhkan pelaksanaan Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... untuk jangka waktu bulan. Apabila(nama Penanggung Hutang)..... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kami akan segera melaksanakan Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *) kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Anggota PUPN Cabang

.....
NIP

Tembusan:

1. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kanwil DJKN
4. Kepala KPKNL u.p.:
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
b. Kepala Seksi Piutang Negara;
5.(Objek Paksa Badan).....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 10B

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : (tgl/bln/thn).....
Sifat :
Hal : Penangguhan Pelaksanaan Paksa Badan
terhadap Sdr.....

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kejaksaan Tinggi
Di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal,
dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal, yaitu sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal tersebut di atas diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal,(nama Penanggung Hutang)..... telah membayar hutangnya kepada negara sebesar Rp..... (di atas 50% dari sisa hutang).
2. Selain melakukan pembayaran,(nama Penanggung Hutang)..... juga telah membuat surat pernyataan sanggup melunasi sisa hutangnya dalam jangka waktu paling lama ... (.....) bulan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menanggukuhkan pelaksanaan Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... untuk jangka waktu bulan. Apabila(nama Penanggung Hutang)..... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kami akan segera melaksanakan Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *) kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

.....
NIP

Tembusan:

1. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Kepala Kanwil DJKN
3. Kepala KPKNL u.p.:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara.
4.(Objek Paksa Badan).....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 11

KEJAKSAAN TINGGI.....

Jalan
...(nama kota dan kode pos)...
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Permintaan Pelaksanaan Segera Paksa Badan
Terhadap Sdr.

Yth. Ketua PUPN Cabang
.....(alamat).....
.....

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal, setelah mempelajari masalahnya secara teliti/cermat terdapat alasan untuk mempercepat/segera melaksanakan upaya Paksa Badan tersebut demi kepentingan umum (Negara/Bangsa/Masyarakat Luas/Kepentingan Pembangunan Nasional) seperti:

-(Uraian Singkat).....
-
- dst.....

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala

.....
NIP

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI
u.p. Jaksa Agung Muda Perdata Dan TUN;
2. Yth. Ketua PUPN Pusat;
3. Yth. Kepala Kanwil DJKN;
4. Yth. Kepala KPKNL



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 12



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG...

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

Nomor : SR- (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Permintaan Bantuan Pelaksanaan Paksa Badan
Terhadap Sdr.

Yth. Kepala Kepolisian
Jl.
.....

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal dan surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk dapat menugaskan anggota Saudara untuk mendampingi Jurusita Piutang Negara pada KPKNL dalam pelaksanaan tugas Paksa Badan yang akan dilakukan pada tanggal

Demikian disampaikan. Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua PUPN Cabang
2. Kepala Kanwil DJKN
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Seksi Piutang Negara;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

Nomor Register BKN : XXXX.XX.XXXXX



Format 13



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

Nomor : SR - (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Segera
Hal : Permintaan Bantuan Penyediaan Tempat
Pelaksanaan Paksa Badan
Terhadap Sdr.

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*)

.....
Jl.
.....

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal dan surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paksa Badan akan kami laksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal terhadap:
 - a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Usia :
 - d. Lain-lain :(uraian lain yang diperlukan)...
2. Berkenaan dengan uraian di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyiapkan tempat pelaksanaan Paksa Badan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua PUPN Cabang
2. Kepala Kanwil DJKN
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
5. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 14



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

BERITA ACARA PENJEMPUTAN
OBJEK PAKSA BADAN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat
di saya:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Nomor tanggal dan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:

1. Nama
Tgl. Lahir/Umur
Pekerjaan
Alamat
.....
2. Nama
Tgl. Lahir/Umur
Pekerjaan
Alamat
.....

telah melakukan

PENJEMPUTAN OBJEK PAKSA BADAN

atas nama(nama Objek Paksa Badan)..... tanggal lahir..... usia..... tahun bertempat
tinggal di sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal

Sebelum pelaksanaan penjemputan ini, kepada yang bersangkutan telah diberitahukan
Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal, namun sampai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang bersangkutan tidak melunasi kewajibannya.



Pelaksanaan penjemputan dituangkan Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan ini yang ditandatangani oleh saya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan Objek Paksa Badan.

Objek Paksa Badan,

Jurusita,

.....

SAKSI-SAKSI:

.....

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

.....

.....

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



Format 15



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG...

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

BERITA ACARA SERAH TERIMA
OBJEK PAKSA BADAN
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat
di..... saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Nomor tanggal dan dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:

1. Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

sesuai dengan Surat Izin Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor tanggal ,
Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal , dan Surat Keterangan Kesehatan
dari Dokter atau Tenaga Medis Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan
..... *) telah menyerahkan:

Nama :(nama Objek Paksa Badan)
Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

kepada(Penanggung Jawab Tempat Paksa Badan).... selaku Kepala Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan **) guna menempatkan
.....(nama Objek Paksa Badan)..... ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan
Negara/Tempat Paksa Badan **) tersebut selama pelaksanaan tindakan hukum Paksa
Badan untuk jangka waktu bulan.

Serah terima Objek Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Objek
Paksa Badan ini yang ditandatangani oleh saya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan **).

Yang Menyerahkan
Jurusita,

Yang Menerima
Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara/Tempat
Paksa Badan **)

.....
NIP

SAKSI-SAKSI

.....
NIP

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) Surat Permintaan Pelaksanaan Paksa Badan Segera dari Kejaksaan Tinggi, apabila ada;

**) millh galeh satu



Format 16



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

LAPORAN PELAKSANAAN
PENJEMPUTAN DAN SERAH TERIMA
OBJEK PAKSA BADAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

dengan ini melaporkan bahwa saya telah menjemput dan menyerahkan:

Nama :(nama Objek Paksa Badan).....
Tgl Lahir/Umur :
Alamat :
sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal

kepada(Penanggung Jawab Tempat Paksa Badan).... selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan *) guna menempatkan(nama Objek Paksa Badan)..... ke dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan *) dengan Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan Nomor dan Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor..... sebagaimana terlampir. Sesuai Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal Objek Paksa Badan ditempatkan ke dalam tempat Paksa Badan untuk jangka waktu (.....) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diserahkan kepada penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Bila ada hal-hal lain yang perlu dilaporkan:

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....(tgl/bln/thn).....
Jurusita,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 17



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-.....
Sifat : Rahasia/Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Pelaksanaan Penjemputan dan
Serah Terima Objek Paksa Badan

.....(tgl/bln/thn).....

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal, dengan ini dapat kami laporkan bahwa tindakan hukum Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penjemputan dan serah terima Objek Paksa Badan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penjemputan Objek Paksa Badan Nomor, Berita Acara Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor..... dan Laporan Pelaksanaan Penjemputan dan Serah Terima Objek Paksa Badan Nomor tanggal yang dibuat oleh Jurusita Piutang Negara (copy ketiganya terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
3. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



Format 18A

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan'
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PAKSA BADAN
NOMOR SPPPB-**

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

- Menimbang : a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang)..... /Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*) kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang)..... yang berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;
- b. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... hingga saat ini belum melunasi hutangnya kepada Negara c.q.(nama Penyerah Piutang).... sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor tanggal yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Badan Nomor tanggal;
- c. bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., perlu melaksanakan perpanjangan jangka waktu tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang
6. Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggal..... terhadap(nama Objek Paksa Badan).....,



MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1.(nama Penanggung Hutang)..... untuk melunasi hutang kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang)..... sejumlah Rp (..... rupiah) dan/atau US\$ (..... dolar Amerika) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan ini diberitahukan.
2. Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(Objek Paksa Badan)..... untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam hal(nama Penanggung Hutang)..... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat;
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kanwil DJKN
4. Kepala Kejaksaan Tinggi
5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor
6.(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan).....;
7.(nama Penyerah Piutang).....;
8.(nama Objek Paksa Badan).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n. Ketua,
Anggota PUPN Cabang
.....

.....
NIP

Nomor Register BKN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 18B

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PAKSA BADAN
NOMOR SPPPB-**

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Menimbang

- a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang)..... /Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*) kepada Negara c.q.(nama Penyerah Piutang)..... yang berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;
- b. bahwa(nama Penanggung Hutang)..... hingga saat ini belum melunasi hutangnya kepada Negara c.q.....(nama Penyerah Piutang).... sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor tanggal yang telah diberitahukan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Badan Nomor tanggal
- c. bahwa dalam rangka penyelesaian Piutang Negara atas nama(nama Penanggung Hutang)....., perlu melaksanakan perpanjangan jangka waktu tindakan hukum Paksa Badan terhadap(nama Objek Paksa Badan).....;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang
6. Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggalterhadap(nama Objek Paksa Badan).....,



MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1.(nama Penanggung Hutang)..... untuk melunasi hutang kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang)..... sejumlah Rp (..... rupiah) dan/atau US\$ (..... dolar Amerika) termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% (sepuluh persen) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Paksa Badan ini diberitahukan.
2. Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan tindakan hukum Paksa Badan terhadap(Objek Paksa Badan)..... untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam hal(nama Penanggung Hutang)..... tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor
5.(pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan).....;
6.(nama Penyerah Piutang).....;
7.(nama Objek Paksa Badan).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

Ketua,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) Pilih salah satu



Format 19



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN
SURAT PERPANJANGAN PAKSA BADAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat
di..... saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Nomor tanggal dan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:

1. Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Dst.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada(nama Objek Paksa Badan)..... bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai, Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor
..... tanggal..... terhadap(nama Objek Paksa Badan).....

Saya selaku Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah
Perpanjangan Paksa Badan Nomor tanggal..... terhadap(nama Objek Paksa
Badan)..... dan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan ini kepada(nama
Objek Paksa Badan)..... dan kepada(Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah
Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan).....*)

.....(tgl/bln/thn).....

Penerima Salinan Surat
Perintah Paksa Badan,
Objek Paksa Badan

Penerima Salinan Surat
Perintah Paksa Badan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara/Tempat
Paksa Badan.....*)

Jurusita,

NIP

SAKSI-SAKSI:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 20



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon :
Faksimile :

LAPORAN PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN PAKSA BADAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jusrita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

dengan ini melaporkan bahwa Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor
tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan).... telah saya laksanakan dengan
pemberitahuan kepada dengan Berita Acara
Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan sebagaimana terlampir.

Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....(tgl/bln/thn).....
Jurusita Piutang Negara,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 21



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Pemberitahuan Perpanjangan
Paksa Badan Terhadap Sdr.

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan tersebut telah dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan Nomor tanggal (copy terlampir) dan Laporan Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan Nomor tanggal (copy terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
3. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 22

KEPALA SURAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHAN NEGARA

Nomor :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Paksa Badan

.....(tgl/bln/thn).....

Yth. Kepala KPKNL

Jln

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan Nomortanggal..... terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini kami beritahukan bahwa jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan a.n.(Objek Paksa Badan).... tinggal 14 (empat belas) hari lagi. Apabila pelaksanaan Paksa Badan a.n.(Objek Paksa Badan).... tersebut akan diperpanjang, maka keputusan perpanjangan Paksa Badan kiranya telah kami terima sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggal.....terhadap(nama Objek Paksa Badan).... tersebut di atas.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Penanggungjawab
LP/ RUTAN/Tempat Paksa
Badan.....*)

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kanwil.....DJKN.....

*) pilih salah satu



Format 23

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon :
Faksimile :

**SURAT IZIN KELUAR
Nomor:**

Ketua PUPN Cabang..... berdasarkan Keputusan Kepala DJKN
Nomor.....tanggal..... tentang Petunjuk Teknis Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan
Piutang Negara dengan ini memberi izin keluar dari tempat Paksa Badan di kepada:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Keperluan :
Jangka waktu : hari/jam *) dari sampai dengan

Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini diberikan dengan ketentuan:

1. Sdr.(nama Objek Paksa Badan).... akan melaksanakan kegiatan sebagaimana keperluan yang diajukannya;
2. Segala biaya yang timbul selama Sdr.(nama Objek Paksa Badan).... melaksanakan kegiatan sesuai izin ini ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Jangka waktu Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan yang telah ditetapkan.
4. Pelanggaran atas Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini akan dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Ketua,

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa
Badan;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Kepala KPKNL;

Nomor Register BKP : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 24

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)...
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

**SURAT IZIN KELUAR
Nomor:**

Ketua PUPN Cabang..... berdasarkan Keputusan Kepala DJKN
Nomor.....tanggal..... tentang Petunjuk Teknis Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan
Piutang Negara dengan ini memberi izin keluar dari tempat Paksa Badan di kepada:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Keperluan :
Jangka waktu : hari/jam *) dari sampai dengan

Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini diberikan dengan ketentuan:

1. Sdr.(nama Objek Paksa Badan).... akan melaksanakan kegiatan sebagaimana keperluan yang diajukannya;
2. Segala biaya yang timbul selama Sdr.(nama Objek Paksa Badan).... melaksanakan kegiatan sesuai izin ini ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Jangka waktu Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan yang telah ditetapkan.
4. Pelanggaran atas Izin Keluar Tempat Paksa Badan ini akan dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. Ketua,
Anggota PUPN Cabang
.....

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara/Tempat Paksa
Badan
2. Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Ketua PUPN Cabang
4. Kepala KPKNL

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 25

KEPALA SURAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHAN NEGARA

Nomor :
Sifat :
Hal : Pemberitahuan Biaya Paksa Badan

.....(tgl/bln/thn).....

Kepada
Yth. Kepala KPKNL
Jalan

Sehubungan dengan Surat Perintah Paksa Badan Nomor..... tanggal....., maka bersama ini kami beritahukan bahwa biaya hidup Objek Paksa Badan tinggal 7 (tujuh) hari lagi, apabila pelaksanaan Paksa badan masih diperpanjang, diminta agar biaya Paksa Badan a.n.(Objek Paksa Badan) dapat dipenuhi untuk bulan berikutnya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Penanggunjawab
RUTAN/RUPAN/LP.....*)

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kanwil.....DJKN.....;



Format 26A

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

SURAT PERINTAH PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN

Nomor SPPOPB-

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

- Menimbang** : a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang)..... /Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*) kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang)..... yang berdasarkan Keputusan PUPN Cabang Nomor Tentang Perintah Paksa Badan Terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... telah dikenakan tindakan hukum Paksa Badan;
- b. bahwa(alasan terbitnya perintah pembebasan paksa badan)....., sehingga(nama Objek Paksa Badan)..... sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibebaskan dari tindakan hukum Paksa Badan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota).... PUPN Cabang
6. Surat Perintah Paksa Badan Nomor.....:.....Tanggal..... terhadap.....(nama Objek Paksa Badan);
7. Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor..... Tanggal..... terhadap.....(nama Objek Paksa Badan);

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara membebaskan(Objek Paksa Badan)..... dari (Tempat Paksa Badan/Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara)(nama kota) (alamat Tempat Paksa Badan)



Salinan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat;
2. Ketua PUPN Cabang;
3. Kepala Kanwil DJKN;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kepolisian Resort/Sektor;
6.(*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*).....;
7.(*nama Penyerah Piutang*).....;
8.(*nama Objek Paksa Badan*).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n. Ketua,
Anggota PUPN Cabang
.....,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



Format 26B

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG**

Jalan
...(nama kota dan kode pos)..
Kotak Pos

Telepon
Faksimile

SURAT PERINTAH PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN

Nomor SPPOPB-

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Menimbang : a. bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... adalah Penanggung
Hutang/Penjamin Hutang(nama Penanggung Hutang).....
/Pengurus(nama Penanggung Hutang)..... yang berhutang*)
kepada Negara cq.(nama Penyerah Piutang)..... yang berdasarkan
Surat Perintah Paksa Badan Nomor tanggal terhadap
.....(nama Objek Paksa Badan)..... telah dikenakan tindakan hukum
Paksa Badan;

b. bahwa(alasan terbitnya perintah pembebasan Paksa Badan)....,
sehingga(nama Objek Paksa Badan)..... sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dibebaskan dari tindakan hukum Paksa Badan;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Perintah Pembebasan
Objek Paksa Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang
Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
tentang pengangkatan sebagai(Ketua/Anggota)..... PUPN Cabang
.....;
6. Surat Perintah Paksa Badan Nomor.....Tanggal.....
terhadap.....(nama Objek Paksa Badan)
7. Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan Nomor.....
Tanggal..... terhadap.....(nama Objek Paksa Badan)

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Kepala KPKNL untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara
membebaskan(Objek Paksa Badan)..... dari (Tempat Paksa
Badan/Lembaga Masyarakatan/Rumah Tahanan Negara)(nama
kota) (alamat Tempat Paksa Badan)



Salinan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PUPN Pusat
2. Kepala Kanwil DJKN
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Kepolisian Resort/Sektor
5.(*pimpinan/penanggung jawab Tempat Paksa Badan*).....;
6.(*nama Penyerah Piutang*).....;
7.(*nama Objek Paksa Badan*).....

Dikeluarkan di
pada tanggal

Ketua,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) Pilih salah satu



Format 27



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG ..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

BERITA ACARA PEMBEBASAN
OBJEK PAKSA BADAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat
di..... saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Nomor tanggal dan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:

1. Nama :
Tgl. Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Dst.

telah melakukan

PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN

atas nama(nama Objek Paksa Badan)..... bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa
Badan Nomor tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan).....

Saya selaku Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan salinan Surat Perintah
Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor tanggal terhadap(nama Objek
Paksa Badan)..... dan Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan ini kepada(nama
Objek Paksa Badan)..... dan kepada(Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah
Tahanan Negara/Tempat Paksa Badan).....*)

.....(tgl/bln/thn).....

Penerima Salinan Surat
Pembebasan Objek
Paksa Badan

Penerima Salinan Surat
Pembebasan Objek Paksa Badan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan/
Rumah Tahanan Negara/Tempat
Paksa Badan.....*)

Jurusita,

NIP

SAKSI-SAKSI:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu



LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN,
JAKSA AGUNG, KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAKSA BADAN
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA

Format 28



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

LAPORAN PEMBEBASAN
OBJEK PAKSA BADAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Piutang Negara pada KPKNL
yang diangkat berdasarkan

dengan ini melaporkan bahwa(nama Objek Paksa Badan)..... telah dibebaskan dari Tempat Paksa Badan berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor tanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan)..... Pembebasan tersebut telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan sebagaimana terlampir.

Untuk keperluan pengurusan selanjutnya saya laporkan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....(tgl/bln/thn).....
Jurusita Piutang Negara,

.....
NIP

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX



Format 29



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG..

Jalan
(nama kota dan kode pos)...

Telepon
Faksimile

Nomor : SR-..... (tgl/bln/thn).....
Sifat : Rahasia/Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Pembebasan Objek Paksa Badan
a.n.(nama Objek Paksa Badan).....

Yth. 1. Ketua PUPN Pusat
2. Ketua PUPN Cabang
3. Kepala Kejaksaan Tinggi

Sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan Nomortanggal terhadap(nama Objek Paksa Badan)....., dengan ini dapat kami laporkan bahwa Surat Perintah Pembebasan Objek Paksa Badan tersebut telah dilaksanakan dengan pembebasan(nama Objek Paksa Badan).....sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor tanggal (copy terlampir) dan Laporan Pembebasan Objek Paksa Badan Nomor tanggal (copy terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu *), kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
3. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN : XXXX.XX.XXXXX

*) pilih salah satu